EFEKTIVITAS BHABINKABTIMAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus di Polsek Marisa Kabupaten Pohuwato)

ARTIKEL JURNAL

NURHAYATI DAUD
NIM. D02416229

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2 0 2 0

EFEKTIVITAS BHABINKAMTIBMAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus di Polsek Marisa Kabupaten Pohuwato)

Nurhayati Daud[1], Widya Kurniati Mohi[2], Apris Ara Tilome[3]
[1,2,3)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 96212
Email: Nur-Daud@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of BHABINKAMTIBMAS in the implementation of the community environmental safety system. The research method used is a qualitative research approach with descriptive research type. The results showed that the effectiveness of BHABINKAMTIBMAS in the implementation of the Community Environmental Security System in the jurisdiction of the Marisa Polsek, Pohuwato Regency has not been effective. Where the implementation of the siskamling program is currently constrained by the number of Bhabinkamtibmas which is only 8 personnel. Of the 8 personnel, only some of them already have Dikbang (development education) while others come from different concurrent positions, such as from Lantas, Criminal Investigation and others, so that the quality of Bhabinkamtibmas members still does not meet the level of competence as Bhabinkamtibmas. There is no budget support for the implementation of Bhabinkamtibmas duties to the community. However, in optimizing the rolling model service for Bhabinkamtibmas personnel from one security post to another.

Keywords: *BHABINKAMTIBMAS, Effectiveness, Siskamling*

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Efektivitas BHABINKAMTIBMAS Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa bahwa Efektivitas BHABINKAMTIBMAS dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Marisa Kabupaten Pohuwato belum berjalan dengan efektiv. Dimana dalam penerapan program siskamling saat ini terkendala pada jumlah Bhabinkamtibmas yang hanya 8 personel. Dari 8 personel tersebut hanya sebagian yang telah memiliki Dikbang (pendidikan pengembangan) sedangkan lainnya berasal dari rangkap jabatan yang berbeda, seperti dari lantas, reskrim dan lainnya, sehingga kualitas anggota Bhabinkamtibmas masih ada yang belum memenuhi tingkat kompetensi sebagai Bhabinkamtibmas. Belum adanya dukungan anggaran akan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas kepada masyarakat. Namun demikian dalam mengoptimalkan pelayanan model *rolling* personel Bhabinkamtibmas dari satu pos kamling ke pos kamling yang lain.

Kata kunci: BHABINKAMTIBMAS, Efektivitas, Siskamling

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menganut prinsip hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menjelaskan bahwa dalam proses kehidupan yang didalamnya terdiri atas masyarakat yang dilayani dan pemerintah yang melayani harus memperhatikan asas hukum. Dengan demikian, maka setiap kehidupan yang dijalan oleh individu dan kelompok harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya kehidupan yang aman damai dan sentosa.

Dalam menjalankan aspek hukum tersebut sehingga tercipta keadilan yang sama di mata hukum, maka tentunya ada lembaga atau institusi yang menjalankannya. Dalam pemerintahan yang ada di Indonesia, yang menjalankan penegakan hukum agar hukum tersebut ditaati, di pedomani dan dijadikan sebagai salah satu falsafa hidup, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang mempunyai tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat.

Tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, pelindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas

Bhabinkamtibmas melalui bentuk pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antar lain dilakukan dengan melalui penugasan anggota Polri menjadi Bhayangkara Pembina Khamtibmas yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas selaku dasar acuan adalah Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor I:B/3377IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta

kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi (Ridwan, 2015)

Bhabinkamtibmas memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, sehingga secara bersamaan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa di ukur berat ringan suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan demi mufakat dan melihat hukum adat istiadat yang terdapat di daerah tersebut. Berdasarkan tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan maka Bhabinkamtibmas di tempatkan di desa/kelurahan guna menekan angka kriminalitas di daerah atau desa tersebut dengan merealisasikan tugas pokoknya.

Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum ada istiadat yang terdapat di masing masing tempat.

Dalam mengemban tugas sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang memiliki peran membina keamanan dan ketertiban masyarakat membimbing kegiatan, mendorong, mengarahkan menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis kepada masyarakat agar tecipta kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang di tandai dengan terjaminnya keamanan,ketertiban dengan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (SOP, 2012).

Di masa sekarang tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun di lingkungan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai sarana masyarakat kepada kepolisian di suatu wilayah agar harus peduli terhadap keamanan di wilayah binaannya, dengan berupaya mengaktifkan kembali siskamling yang selama ini terbengkalai karena sistem Keamanan Lingkungan atau siskamling

merupakan sebuah sistem keamanan yang sudah ada di setiap daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Maksud dan tujuannya adalah menumbuhkembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan masyarakat dan daya tanggap dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungannya.

Banyaknya aduan atau keluhan dari masyarakat karena banyaknya terjadi kasus pencurian yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Bertolak pada kasus itulah timbul keresahan dari warga dan melaporkan hal inilah kepada kamtibas, Jadi dalam arti lain bahwa peranan dari Bhabinkamtibmas dan siskamling di Kecamatan pohuwato sangatlah minim, hal ini ditandai dengan adanya kasus tindak pidana barulah adanya upaya dari Bhabinkamtibmas dengan melakukan tugas yang semestinya sehingga nantinya masyarakat mengetahui peran penting dari Bhabinkamtibmas dan siskamling tersebut di masyarakat.

Saat ini sistem keamanan lingkungan yang masih dipakai serta paling efisien adalah Pos Ronda / Pos Kamling, merupakan Sistem Keamanan Lingkungan yang di mana masyarakat dapat berperan langsung dalam menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Pos Ronda / Pos Kamling dapat menekan dan mengatasi kriminalitas di sebuah lingkungan dan setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket yang di rotasi setiap minggunya,

Salah satu bagian terpenting dalam pemeliharan keamanan lingkungan adalah peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaa lingkungan diwujudkan didalam suatu bentuk Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling). Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan. Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 mengatur tentang Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling). Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing; b. terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas".

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi yang harus diciptakan negara kepada setiap warga negaranya, dengan adanya partisipasi dari warga negaranya akan timbul keamanan dan ketertiban yang baik. Dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dilakukan oleh Polri. Akan tetapi di lingkungan masyarakat kecil seperti kampung/desa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan dengan adanya siskamling.

Duncar yang di kutip Richard Steers (1985:53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahanan, baik dalam arti pertahanan pencapaian bagian-bagiannya maupunpertahan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. Intergrasi yaitu pengkuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu di gunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Terkait dengan penelitian tentang efektivitas Bhabinkamtibmas telah cukup banyak kajian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Leo Dedy de Fretes pada tahun 2015 dengan judul penelitian Fungsi Babinkamtibmas Dalam Penegakan Hukum Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif HAM. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nofta Wulan Sari pada tahun 2016 yang mengangkat judul penelitian Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, serta penelitian yang dilakukan oleh Natalia Katherine Sitompul pada tahun 2015 yang mengangkat judul penelitian Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Penanggulangan Kejahatan di Kota Metro.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti diatas memiliki cukup banyak persamaan dan perbedaannya. Dari sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada subjek yang sama yakni Bhabinkamtibmas, metode penelitian yang digunakan serta fokus kajiannya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, lokus penelitian dan jangka waktu penelitian.

METODE PENELITIN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga,

masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari beberapa sember yang antara lain:

1) Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian, informasi langsung dari sumber datanya. Yaitu anggota Bhabinkamtibmas. Kemudian dikembangkan dengan kata-kata yang terkait dengan informasi yang di teliti, pengamatan dan wawacara pada semua obyek tersebut. Adapun yang menjadi informan kunci adalah:
   a. Kapolsek
   b. Bhabinkamtibmas 4 orang
   c. Masyarakat 3 orang
2) Data Sekunder adalah data yang menunjang data primer, data sekunder ini akan di ambil dari dokumen-dokumen atau segala laporan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian termasuk buku-buku dan jurnal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan objek penelitian secara verbal melalui data yang telah terkumpul dengan melakukan wawancara kepada informan

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langung dan melaukan pencatatan terhadap gejala yang di jumpai di lapangan.dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dengan obyek yang di teliti.
b. Wawancara, dladalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Metode wawancara dalam penelitian ini di gunakan untuk memperoleh keterangan dan informasi dari subyek yang di teliti dari anggota Bhabinkamtibmas
c. Dokumentasi,dengan mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang segala fenomena yang akan di teliti di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kepolisian Sektor Marisa dari aspek geografisnya adalah bagian dari Kepolisian Resort Pohuwato Provinsi Gorontalo, merupakan satuan kerja kewilayahan yang terletak di jalan Trans Sulawesi No.18 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

IPTU dan dibantu seorang Wakapolsek berpangkat IPDA, keduanya merupakan unsur pimpinan. Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolaan organisasi unsur pimpinan dibantu unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sinum (seksi umum). Kemudian adanya unsur pembantu staf pelaksanaan yaitu pembinaan bagsunda (bagian sumber daya), perencanaan Bagren (bagian perencanaan) dan operasional yaitu Sat Binmas.

1) Kuantitas Bhabinkamtibmas di Polsek Marisa

   Jumlah Bhabinkamtibmas sebanyak 8 Bhabin pada tahun 2020 hingga skarang ini jumlahnya tidak memenuhi syarat efektif

2) Kualitas Bhabinkamtibmas di Polsek Marisa
   Bhabinkamtibmas yang telah memiliki Skep Bhabinkamtibmas dan pendidikan pengembangan (Dikbang)
3) Dukungan Anggaran
   Dukungan anggaran sama halnya seperti dukungan SDM yang tidak bisa di sisihkan dalam kegiatan.

Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendorong pelaksanaan sistem keamanan lingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) masyarakat yang kurang aktif dan tidak peduli dengan sistem keamanan di desa, dan 2) sistem penyuluhan pihak Bhabinkamtibmas yang tidak menyeluruh di desa-desa hingga berdampak pada masyarakat

Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis dituangkan dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) tentang pengukuran efektivitas dengan indikator terdiri atas pencapaian tujuan, Integrasi, dan adaptasi.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali, menggunkapan serta mendeskripsikan hasil peneliti berupa hasil wawancara, dan data-data yang mengemukakan tentang Efektivitas Bhabinkamtibmas dalam sistem keamanan lingkungan, yang di teliti melalui 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, efektivitas di gunakan yaitu konsep tentang dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan unsur penting dalam efektivitas adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang di sepakati secara maksimal.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongktit.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dalam tahap-tahap pencapaian tujuan dalam Efektivitas Bhabinkamtibmas sudah berjalan dengan baik tetapi belum makimal, sasaran kinerja yang di capai masih belum sesuai yang akhirnya mempengaruhi kuantitas anggota Bhabinkamtibmas.

Sedangkan sesuai dengan observasi peneliti di lapangan faktor efektivitas Bhabinkamtibmas dalam sistem keamanan lingkungan tidak maksimal di lihat dari kinerja anggota yang tidak ada peningkatan dan kurang kreatifitas di tambah dengan personil yang kurang sehinnga belum bisa mengefektifkan fungsi sistem keamanan lingkungan di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Untuk menyikapinya kita dapat menyimpulkan faktor pendukung dan faktor penghambat, sebagai patokan untuk meningkatkan keefektivitas anggota Bhabinkamtibmas

1) Faktor Pendukung
   a) Adanya dukungan SOP yang mengatur sinergi Bhabinkamtibmas tingkap polres dan polsek
   b) Dukungan pemerintah setempat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
   c) Menyelesaikan masalah dengan mediasi (pencegahan sebelum gangguan kamtibmas)
   d) Dukungan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran polri meningkat
2) Faktor penghambat
   a) Kurangnya kuantitas personel
   b) lokasi personel bhabin dengan lokasi desa binaan jauh
   c) Dengan kurangnya personil mengakibatkan rangkap jabatan
   d) Lambatnya menerima informasi terbaru mengenai gangguan keamanan dan ketertiban
   e) Sering terjadi perpindahan tempat kerja pada anggota personel.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sehinnga dalam sistem keamanan lingkungan dibutuhkan integrasi dari kelompok masyarakat desa, kelompok pemuda dan anggota bhabin itu sendiri agar program ini dapat di katakan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bahwa kemampuan anggota dalam penyampaian sosialisasi sangat baik, tetapi respon masyarakat dalam mennanggapi hasilnya masih belum di terima secara sempurna. Sehingga mempengaruhi keefektifitas bhabinkamtinas dalam sistem keamanan lingkungan.

Sedangkan pengamatan peneliti di lapangan tentang sosialisasi sudah berjalan sesuai apa yang telah di tetapkan namun kendala-kendala yang di temui saat pelaksanaan sosialisasi tentang sistem keamanan lingkungan tidak efektif hal itu karena peneliti menjumpai banyak masyarakat yang tidak serius dalam menanggapi apa yang di sampaikan oleh pematari dan ada juga beberapa masyarakat yang tidur dalam penyampaian sosialisasi, menurut peneliti hal ini terjadi karena sosialisasi hanya pemanis saja karena hasil akhir dari sosialisasi tersebut tidak terselenggarakan.

Untuk menyikapi hal tersebut alangkah lebih baik di harapkan kepada pihak anggota Bhabinkamtibmas dapat melaksanakan fungsi dan peran dan ikut memberikasan saran atas keefektifan Bhabinkamtibmas dalam sistem keamanan lingkungan, seperti:

1) Melakukan Rolling Job Personel
   Melakukan perputaran atau penggantian personel untuk melakukan program siskamling seperti satu bhabin satu pos ronda/kamling yang berarti satu personel Bhabinkamtibmas bertanggung jawab atas pos

ronda/kamling tersebut dengan tujuan pengaktifan kembali siskamling dan menciptakan kepercayaan masyarakat

2) Melakukan Ragam Kegiatan Siskamling

Personel Bhabinkamtibmas memberikan arahan dan membantu kegiatan siskamling, memantau pembuatan jadwal ronda dan ikut berbaur dengan masyarakat tersebut, adapaun kegiatan yang di lakukan oleh desa yaitu seperti:

a) Penjagaan;
b) Patroli atau perondaan;
c) Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
d) Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
e) Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
f) Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
g) Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
h) Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
i) Melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua siskamling.

3) Memberikan Arahan atan Membantu Melengkapi kelengkapan pos kamling. Adapun kelengkapannya yaitu:

a) buku pedoman pelaksanaan tugas pos kamling
b) petugas kamling minimal 3 orang
c) panel kegiatan harian
d) buku mutasi kegiatan petugas
e) sistem alarm dan komunikasi yang di sediakan
f) perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan
g) jas hujan
h) senter

4) Pemberdayaan Kearifan Lokal Berupa Rasa Kekerabatan yang Erat. Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu. Terdapat beberapa langkah yang digunakan Kepolisian untuk mendeteksi potensi kearifan lokal lain yaitu dengan cara:

a) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas Polsek untuk membuat rencana latihan peningkatan pengetahuan anggota Bhabinkamtibmas

b) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk menghubungi dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta perangkat desa setempat untuk bisa memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, dan mencari tahu media-media apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan dan mempererat ikatan dengan masyarakat di desa setempat.
c) Kapolres memerintahkan Kasat dan Kanit Binmas untuk membuat buku saku untuk para anggota Bhabinkamtibmas sebagai acuan singkat dalam pelaksanaan tugas di lapangan bagi para bhabin.
d) Kasat dan Kanit Binmas memerintahkan anggota Bhabin untuk merangkum buku-buku terkait pengetahuan mengenai sejarah lisan dan budaya Polsek Menganti kemudian hal-hal mengenai tupoksi Bhabinkamtibmas dalam bentuk perpustakaan sederhana.

5) Siskamling Merupakan Suatu Kegiatan yang Dilaksanakan Secara Nyata (*real*) oleh Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam mengunjungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri.

Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-progam Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis,

mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan uraian hasil wawancara tolak ukur proses pengadaan tenaga kerja dalam menunjang kinerja Bhabinkamtibmas polsek marisa belum efektif karena karena di lihat dari kurang personil Bhabinkamtibmas, anggota bekerja tidak sesuai dengan kompetensi dan sumber daya manusia yang kurang hingga mempengaruhi efektifitas para anggota.

Menurut observasi peneiti di lapangan dengan hasil wawancara sesuai karena melihat jumlah anggota dan masing masing memiliki tugas rangkap jabatan sehinnga masing-masing anggota tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan sumberdaya manusia tidak maksimal sehingga fungsi anggota dalam sistem keamanan lingkunganpun tidak maksimal. Apabila anggota di tempatkan sesuai bidang dan kompetensi yang mereka kuasai dan jumlah personil di tambah maka fungsi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan sistem keamanan lingkungan akan berkembang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas BHABINKAMTIBMAS Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat yang berada di wilayah hukum Polsek Marisa Kabupaten Pohuwato belum berjalan dengan efektiv. Dimana dalam penerapan program siskamling saat ini terkendala pada jumlah Bhabinkamtibmas yang hanya 8 personel pada tahun 2020. Dari 8 personel Bhabinkamtibmas tersebut hanya sebagian yang telah memiliki Dikbang (pendidikan pengembangan) sedangkan lainnya berasal dari rangkap jabatan yang berbeda, seperti dari lantas, reskrim dan lainnya, sehingga kualitas anggota Bhabinkamtibmas masih ada yang belum memenuhi tingkat kompetensi sebagai Bhabinkamtibmas. Dukungan anggaran sudah diterima dari Polres, sayangnya rincian anggaran masih kurang maksimal, karena belum teranggarkannya biaya-biaya kegiatan pelayanan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat, biaya-biaya penambahan sarana prasarana pendukung tugas dan biaya-biaya pemeliharaan sarana prasarana yang diperlukan. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan program siskamling Polsek Marisa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

Strategi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi penerapan program

siskamling adalah dengan melakukan model *rolling* personel Bhabinkamtibmas dari satu pos kamling ke pos kamling yang lain; memberikan atau memberi arahan untuk kepelngkapan pos kamling di tiap pos ronda/kamling, pemberdayaan kearifan lokal berupa rasa kekerabatan yang erat antar warga dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban yang kondusif, serta adanya giat sosialisasi polisi mitra warga untuk menghilangkan citra militer polisi.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah.

1. Berdasarkan kesimpulan yang di dapatkan peneliti menyarankan memaksimalkan penerapan tugas Bhabinkamtibmas dalam program sistem keamanan lingkungan
2. Kepada instansi kepolisian memaksimalkan SDM dan kompetensi anggota

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pintar. 2015. Bhabinkamtibmas Edisi 2. Polda Gorontalo

Buku Pintar. 2014. Bhabinkamtibmas. Direktorat Polda Gorontalo

http://polsek-gunungpuyuh.blogspot.com/2012/08/peranan-dan-kehadiran-bhabinkamtibmas.html (di akses pada 07.30, 05-10-2019).

Handoko, T. H. 2004. Manajemen, Edisi Kedua, Cetakan Kedua Puluh Enam. BPFE. Yogyakarta

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Andi

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling).

Polmas. 2009. Pedoman Pelaksanaan POLMAS Bagi Pelaksana Polmas. Jakarta

Rahmat, Aswin. 2013. Upaya Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan Pencurian Motor. Lampung

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&H, Bandung: Alfabeta

SOP. 2012. Standar Operasional Prosedur. Mataram

Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. jakarta: PT. Bumi Aksara

Strauss, A. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Steers, Richard M. 1980. Terj: Magdalena Jamin, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga, 1980

Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor I:B/3377IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 Tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan

Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia